

III.A2.8

350/361 EKONOMI PEMBANGUNAN

LAPORAN PENELITIAN LANJUT



PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA
OPERASIONAL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
DI PROVINSI BANTEN

Oleh :

Drs. Suhartono, M.Si
Ir. Tri Kurniawati R., M.Si

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA**

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN LANJUT**

Judul Penelitian : PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN BELANJA OPERASIONAL TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI
BANTEN

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Drs. Suhartono, M.Si.
b. NIDN : 0023076301
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
e. Nomor HP : 081319896154
f. Alamat Surel (Email) : tono@ut.ac.id

Anggota Peneliti
a. Nama Lengkap : Ir. Tri Kurniawati R., M.Si
b. NIDN : 0022105203
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Biaya Penelitian : Rp 30.000.000,00



Tangerang Selatan, 14 Desember 2015
Ketua Peneliti,

Drs. Suhartono, M.Si
NIP 196307231998021001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Stamp: UNIVERSITAS TERBUKA, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, AGENSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. Signature: Ir. Kristina Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D., NIP 19610212 198603 2 001.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6
2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Klasik)	11
2.3. Belanja Operasional	15
2.4. Belanja Modal	16
2.5. Kerangka Pemikiran	17
2.6. Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Jenis dan Sumber Data	19
3.2. Alat Analisis	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Kondisi Geografis	22
4.2. Penduduk	23
4.3. Sosial	25
4.4. Kesehatan	26

ABSTRAK PENELITIAN

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA OPERASIONAL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI BANTEN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional terhadap jumlah alokasi belanja modal di Provinsi Banten. Data yang digunakan adalah data IPM, Pertumbuhan Ekonomi, belanja operasional serta alokasi belanja modal di Provinsi Banten selama 10 tahun. Adapun alat analisis yang digunakan adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional terhadap alokasi belanja modal di provinsi Banten menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2) dan Belanja Operasional (X_3). Sedangkan sisanya ($100\% - 83,5\% = 16,5\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Saran dari penelitian ini adalah: (1) Dalam usaha mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Provinsi Banten maka perlu peningkatan porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah. (2) Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan efisiensi belanja operasional karena dari hasil uji simultan secara bersama-sama ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal (Y).

Kata kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Operasional dan Modal, Provinsi Banten*

Latar Belakang Masalah

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity (PPP) index*. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan

tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output* riil per orang. Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikannya, beberapa negara maju menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah.

Belanja operasional merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dari anggaran, tak terkecuali APBD. Suatu entitas, apalagi suatu negara, pasti membutuhkan pengeluaran-pengeluaran rutin dalam rangka operasi negara tersebut. Namun demikian, seharusnya belanja operasional ini jumlahnya tidak terlalu membebani anggaran. Alasannya karena manfaat ekonomis yang didapatkan dari adanya belanja operasional cenderung berjangka pendek, hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin saja.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas asset.

Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan informatika guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk seta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak. Dengan demikian maka pemerintah daerah memerlukan alokasi belanja modal untuk menunjukkan pencapaian indeks pembangunan manusia yang baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi..

Untuk memacu indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi tersebut maka pemerintah propinsi Banten perlu mengalokasikan belanja modalnya agar pembangunan kualitas fisik dan non fisik yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan di dalam penelitian ini adalah : Apakah Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional berpengaruh terhadap jumlah alokasi belanja modal?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan belanja operasional terhadap jumlah alokasi belanja modal di Provinsi Kalimantan Barat.

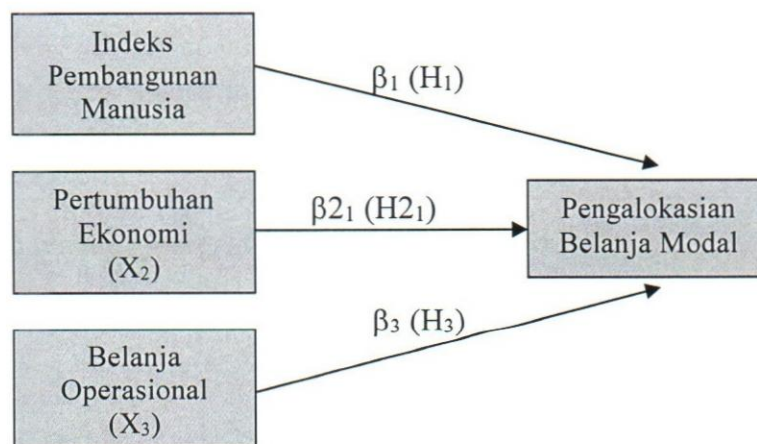
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut PP yang sama, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Jenis belanja yang ada pada entitas pemerintah antara lain meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja lain-lain, dan transfer.

Dalam paragraf 37 Lampiran 1.03 PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal lebih bersifat jangka panjang daripada belanja operasional.

Kerangka proses berpikir dalam studi ini dimulai dengan studi teoritik, yakni menganalisa teori-teori yang relevan dengan studi ini yang dimulai dari Teori Kesejahteraan, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Teori Belanja Operasional dan Belanja Modal. Teori-teori ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun konsep tesis dengan proses berpikir deduktif, karena teori ini mempunyai kajian yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus khusus. Dasar teoritik dan kajian empirik yang mendasari hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Kerangka pemikiran pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional terhadap pengalokasian belanja modal di propinsi Banten.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : Indeks pembangunan manusia, Pertumbuhan ekonomi, dan Belanja operasional berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional terhadap alokasi belanja modal di provinsi Banten menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan rumus (Sugiarto, 2002) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

Y = Pengalokasian Belanja Modal

β_0 = Intersep

β = Koefisien regresi

x_1 = Indeks pembangunan Manusia

x_2 = Pertumbuhan Ekonomi

x_3 = Belanja Operasional

e = error term

Adapun uji hipotesis dalam Regresi Berganda yakni sebagai berikut:

- $H_0 : P = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh nyata dari variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dengan $\alpha = 5\%$.
- $H_0 : P \neq 0$, artinya terdapat pengaruh nyata dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent* dengan $\alpha = 5\%$.

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji Statistik *t* pada dasarnya menunjukkan apakah masing-masing variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional terhadap jumlah alokasi belanja modal di Provinsi Banten.

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dilakukan uji simultan dengan analisis regresi berganda dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Tabel Koefisien Determinasi X₁, X₂ dan X₃ terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.914 ^a	.835	.753	163.691409

a. Predictors: (Constant), Belanja Operasional, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel *Model Summary* menunjukkan besarnya *R Square* sebesar 0,835, hal ini berarti 83,5% variasi Pengalokasian Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X₁), Pertumbuhan Ekonomi (X₂) dan Belanja Operasional (X₃). Sedangkan sisanya (100% - 83,5% = 16,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

1. Hipotesis 1 (pertama) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal adalah terbukti, karena secara empiris data indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk menguji arah dan kekuatan hubungan indeks/ pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal di Propinsi Banten memiliki standard deviasi yang tidak terlalu

besar (-14282,2981) dibandingkan dengan koefisien regresinya (212,242) sehingga membentuk t-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ (2,511). Koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 2,306 (tabel distribusi t), bermakna bahwa kontribusi indeks pembangunan manusia terhadap alokasi belanja modal cukup besar dibandingkan dengan koefisien pertumbuhan ekonomi dan koefisien belanja operasional, arah hubungan antara indeks pembangunan manusia dan alokasi belanja modal yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat negatif yang bermakna jika angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tinggi maka alokasi belanja modal rendah dan sebaliknya, temuan ini sesuai dengan logika dan harapan dimana slope (kemiringan) $\beta_1 < 0$.

2. Hipotesis 2 (kedua) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, ternyata tidak terbukti, karena secara empiris data pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menguji arah dan kekuatan hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal di provinsi Banten memiliki standar deviasi yang lebih besar (-561,761) dibandingkan dengan koefisiennya (160,221) sehingga membentuk t-hitung yang lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel $\alpha = 5\%$ (2,306). Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,535 (tabel 4.6) bermakna bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi variabel indeks pembangunan manusia, namun masih lebih besar dibandingkan dengan variabel belanja operasional, arah hubungan yang positif bermakna bawa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka alokasi belanja modal akan meningkat 0,09 persen. Hal lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak begitu berpengaruh terhadap belanja modal di duga karena secara integral faktor pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan tingkat pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten secara nasional masih dibawah nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Hipotesis 3 (ketiga) yang menyatakan belanja operasional berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal, ternyata tidak terbukti, karena secara empiris data belanja operasional yang digunakan untuk menguji arah dan kekuatan hubungan belanja operasional dengan alokasi belanja modal di Provinsi Banten standar deviasi 233,175 dibandingkan dengan koefisien regresinya (0,120) sehingga membentuk t-hitung yang lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ (1,697). Koefisien belanja operasional sebesar -0,086 (tabel 4.8), bermakna bahwa kontribusi belanja operasional tidak terlalu besar dibandingkan dengan koefisien indeks pembangunan manusia dan koefisien pertumbuhan ekonomi. Arah hubungan antara belanja operasional dengan alokasi belanja modal yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat negatif yang bermakna jika jumlah belanja operasional di Provinsi Banten tinggi maka jumlah alokasi belanja modal rendah dan sebaliknya. Selain hal tersebut faktor lain yang memungkinkan belanja operasional tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena pada jumlah alokasi belanja operasional belum mencerminkan tingkat kemajuan perbaikan kualitas IPM baik dari sudut fisik dan non fisik, serta masih rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Adanya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, di sisi penggunaan akan menaikkan pengeluaran konsumsi masyarakat (C), pengeluaran investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah (G) dan pengeluaran untuk ekspor dan impor (X-M) dalam perekonomian. Meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut akan mendorong naiknya permintaan barang dan jasa dalam perekonomian dimasa yang akan datang, sehingga produksi meningkat. Adanya pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tambahan pendapatan dan tambahan pendapatan akan menaikkan jumlah tabungan akan menaikkan jumlah investasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang bersifat negatif, yang bermakna jika indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten sudah tinggi maka jumlah alokasi belanja modal menjadi rendah.

2. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif yaitu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dapat mengalokasikan belanja modal di Provinsi Banten.
3. Belanja Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang bersifat negatif, yang bermakna jika belanja operasional di Provinsi Banten sudah tinggi maka jumlah alokasi belanja modal menjadi rendah, begitu juga sebaliknya.

Saran

1. Dalam usaha mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Provinsi Banten maka perlu peningkatan porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan efisiensi belanja operasional karena dari hasil uji simultan secara bersama-sama ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1990. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- BPS. 2014. PDRB Propinsi Banten.
- BPS. 2015. Banten Dalam Angka.
- Dewi dkk, 2014. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota di Propinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 02, FEB Universitas Udayana Denpasar
- Halim dan Abdullah, 2006. *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Indonesia 2 (2) 17-32
- Kurniawan A. Efendi. 2011. *Analisa Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2014*. diunduh tanggal 16 Februari 2015 di <http://.....unpad.ac.id>
- Mudrajat, Kuncoro. 1977. *Ekonomi Pembangunan Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma LP3ES*, No. 3 Tahun XXVI.
- Sugiarto, Siagian. 2002. *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, M.P. 2000. *Economic Development, Seventh Edition*, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi dunia Ketiga Edisi IX*, Jakarta: Erlangga.